

**PEMETAAN SOSIAL DAN RELASI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN
EKONOMI KAWASAN TRANSMIGRASI LUNANG SILAUT**

Viverita¹, Reno Dzaky Putranto², Annisa Nur Fatikha Sari³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

²Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Indonesia

³Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya dan Bahasa, Universitas Indonesia

Email : viverita@gmail.com¹, Renodzakyputranto@gmail.com²,
annisafatikha02@gmail.com³

Abstrak

Dasar penguatan ekonomi kawasan memerlukan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan relasi kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan keadaan sosial dan relasi kelembagaan guna mendukung penguatan ekonomi Kawasan Transmigrasi Lunang-Silaut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pemetaan sosial dan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (IDI), serta diskusi kelompok terarah (FGD) dengan melibatkan aktor-aktor utama, seperti pemerintah daerah, kelembagaan ekonomi, dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial dan kelembagaan ekonomi di Lunang Silaut memiliki potensi besar, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi, belum optimalnya kolaborasi antar lembaga, serta belum terintegrasinya peran aktor dalam satu ekosistem ekonomi kawasan. Pemetaan ini mampu mengidentifikasi aktor kunci, pola hubungan antar lembaga, serta wilayah strategis yang berperan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan model kolaborasi kelembagaan serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi kawasan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah transmigrasi Lunang Silaut.

Kata Kunci: Pemetaan Sosial-Ekonomi, Relasi Antar Kelembagaan, Kawasan Transmigrasi Lunang-Silaut

Abstract

The basis for strengthening the regional economy requires a deep understanding of social conditions and local institutional relations. This study aims to map social conditions and institutional relations to support economic strengthening in the Lunang-Silaut Transmigration Area. The approach used is qualitative with social and spatial mapping methods based on Geographic Information Systems (GIS). Data collection was carried out through field observations, in-depth interviews (IDI), and focus group discussions (FGD) involving key actors, such as local government, economic institutions, and community groups. The results of the study show that the social and economic institutional structures in Lunang Silaut have great potential, but still face obstacles in the form of limited coordination, suboptimal collaboration between institutions, and the lack of integration of actors' roles in a single regional economic ecosystem. This mapping was able to identify key actors, patterns of inter-institutional relationships, and strategic areas that play a role in community economic

activities. These findings are expected to form the basis for the formulation of an institutional collaboration model and support more focused, inclusive, and sustainable regional economic development planning in the Lunang Silaut transmigration area.

Keywords: Socio-Economic Mapping, Inter-Institutional Relations, Lunang-Silaut Transmigration Area

PENDAHULUAN

Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut merupakan salah satu kawasan prioritas nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan kawasan ini sebagai wilayah potensial dengan fokus pada penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pengembangan industri berbasis komoditas lokal. Berbagai upaya pengembangan telah dilakukan, antara lain melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi, serta pengembangan kawasan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah (Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2025).

Secara historis, kawasan ini mulai berkembang sejak dibukanya wilayah transmigrasi pada tahun 1973 dan terus mengalami dinamika sosial, ekonomi, serta kelembagaan hingga saat ini. Masyarakat yang bermukim di kawasan Lunang Silaut berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, sehingga membentuk struktur sosial yang heterogen. Kondisi tersebut menciptakan potensi sekaligus tantangan dalam membangun kohesi sosial serta kerja sama antar aktor dalam mendukung pembangunan ekonomi kawasan (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2020).

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian pangan, dan komoditas hortikultura, pemanfaatan potensi tersebut belum berjalan secara optimal. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi meliputi lemahnya koordinasi antar kelembagaan, terbatasnya integrasi antara pelaku produksi dan pemasaran, serta belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kawasan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya fisik, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial dan kelembagaan yang terbangun di dalamnya (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024).

Dalam konteks tersebut, pemetaan sosial dan relasi kelembagaan menjadi pendekatan yang penting untuk memahami pola hubungan antar aktor, peran lembaga dalam sistem ekonomi lokal, serta potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan. Pemetaan ini tidak hanya berfungsi sebagai gambaran spasial, tetapi juga sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi aktor kunci, jaringan kerja, serta wilayah strategis yang berperan dalam penguatan ekonomi

kawasan (Rahmawati & Prasetyo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi sosial dan relasi kelembagaan di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut serta menganalisis perannya dalam mendukung penguatan ekonomi kawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi dan model kolaborasi kelembagaan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi lokal yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial serta relasi kelembagaan dalam mendukung penguatan ekonomi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut. Pendekatan ini dipilih agar analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menggambarkan pola hubungan antaraktor dan kelembagaan secara lebih mendalam dan sistematis.

Metode kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview/IDI*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) untuk menggali informasi mengenai peran aktor, dinamika sosial, pola interaksi antar kelembagaan, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap upaya penguatan ekonomi kawasan. Sementara itu, metode kuantitatif digunakan melalui survei lapangan guna memperoleh data terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan dan peran lembaga ekonomi, serta tingkat keterhubungan antaraktor dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah studi literatur untuk mengidentifikasi konsep, pendekatan, dan kriteria pemetaan sosial serta relasi kelembagaan yang relevan dengan konteks pengembangan kawasan transmigrasi. Tahap kedua adalah pengumpulan data sekunder yang mencakup data wilayah, kelembagaan, kependudukan, serta potensi komoditas unggulan di Kawasan Transmigrasi Lunang–Silaut.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan IDI dan FGD dengan pemangku kepentingan utama, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, kelembagaan ekonomi, dan perwakilan masyarakat, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, relasi antaraktor, serta tantangan dalam pengembangan ekonomi kawasan. Selain itu, dilakukan survei masyarakat untuk mengidentifikasi keberadaan dan peran kelembagaan ekonomi, pola kolaborasi antaraktor, serta hambatan yang dihadapi masyarakat dalam

mengakses lembaga dan mengembangkan potensi komoditas lokal.

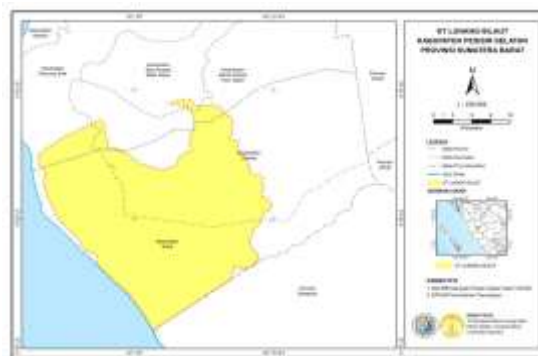
Data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk memetakan struktur sosial, pola relasi kelembagaan, serta keterkaitan antaraktor dalam mendukung penguatan ekonomi kawasan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi model kolaborasi kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebagai tahap akhir, FGD lanjutan dilaksanakan untuk memvalidasi hasil analisis dan mengonfirmasi rancangan model kolaborasi kelembagaan bersama para pemangku kepentingan terkait.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan sosial dan relasi kelembagaan yang komprehensif serta memberikan dasar yang kuat bagi perumusan strategi penguatan ekonomi Kawasan Transmigrasi Lunang–Silaut secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah dan Peta Administratif

Pada pembahasan ini, penulis akan memberikan informasi mengenai hasil dan pembahasan analisis penelitian yang terdiri dari hasil pemetaan Kawasan Transmigrasi Lunang-Silaut. Berikut adalah hasil pemetaannya:



Gambar 1. Peta Batas Administrasi KT Lunang-Silaut

Untuk mendapatkan peta batas Kawasan Transmigrasi Lunang-Silaut, dalam hal ini, KT Lunang Silaut terdiri dari 2 UPT (Unit Pembangunan Transmigrasi), yakni : UPT Lunang dan UPT Silaut. Peneliti melakukan identifikasi terhadap informasi wilayah serta google earth. Hal ini memudahkan melihat batas antar kawasan atau kecamatan dengan kawasan peyangga atau kecamatan lainnya.



Gambar 2. Peta Batas Desa/Nagari di KT Lunang-Silaut

Berdasar hasil pengolahan maka didapati data luas masing-masing desa/nagari di Kawasan Transmigrasi Lunang-Silaut adalah 923,18 km². Dengan persebaran pada tiap desa/nagari yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Persebaran Pada Tiap Desa/Nagari

Desa/Nagari	Luas Wilayah (km²)
Sindang Lundang	157,37
Lunang	102,52
Pondok Parian Lunang	77,30
Lunang Tengah	47,66
Lunang Utara	22,39
Lunang Selatan	13,06
Lunang Tiga	12,87
Lunang Satu	10,05
Lunang Barat	7,52
Lunang Dua	5,97
Air Hitam	204,00
Sungai Sirah	67,91
Sungai Pulai	54,62
Sambungo	35,29
Lubuk Bunta	16,05
Pasir Binjai	14,67
Sungai Sarik	10,00
Talang Binjai	7,41
Durian Seribu	2,97



Gambar 2. Peta Sebaran Lembaga Ekonomi Eksisting

Berdasarkan hasil pemetaan, lembaga ekonomi di Kawasan Transmigrasi Lunang–Silaut secara umum telah tersedia di setiap desa/nagari. Lembaga tersebut terutama berupa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi desa, serta koperasi yang dalam perkembangannya terus diperkuat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan adanya upaya pemerataan kelembagaan ekonomi secara administratif di seluruh wilayah kawasan transmigrasi.

Meskipun demikian, hasil pemetaan spasial menunjukkan bahwa tingkat aktivitas, peran, dan fungsi lembaga ekonomi tersebut belum sepenuhnya merata. Beberapa lembaga ekonomi, khususnya koperasi mandiri dan kelompok tani yang telah berjalan lebih lama, cenderung berkembang di wilayah yang memiliki aksesibilitas lebih baik dan kedekatan dengan pusat aktivitas kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor spasial, seperti kedekatan dengan pusat permukiman, Kawasan Terpadu Mandiri (KTM), serta jaringan jalan utama, turut mempengaruhi intensitas kegiatan kelembagaan ekonomi di masyarakat..

Keberadaan kantor wali nagari pada masing-masing desa juga berperan sebagai simpul administratif dan koordinatif yang penting dalam mendukung aktivitas kelembagaan. Kantor wali nagari menjadi titik temu berbagai aktor, baik pemerintah, lembaga ekonomi, maupun masyarakat, sehingga memiliki potensi strategis dalam mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga di tingkat lokal.

Selain lembaga ekonomi formal, pemetaan juga mengidentifikasi keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di kawasan penelitian. UMKM, seperti warung, toko kelontong, dan usaha makanan, cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki tingkat keramaian tinggi, seperti kawasan KTM Lunang Silaut serta sepanjang jalur jalan provinsi. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas UMKM sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan arus mobilitas masyarakat, sehingga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal di titik-titik strategis kawasan.

Relasi Kelembagaan dan Pola Interaksi Antar Aktor

Hasil pemetaan sosial menunjukkan bahwa relasi antar aktor di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut terbentuk melalui hubungan formal dan informal yang melibatkan pemerintah desa, lembaga ekonomi, serta kelompok masyarakat. Relasi formal umumnya terjalin melalui program pemerintah, pendampingan, serta kegiatan musyawarah desa, sedangkan relasi informal berkembang melalui jejaring sosial masyarakat dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Namun demikian, pola relasi antar kelembagaan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi yang kuat. Beberapa lembaga masih bekerja secara sektoral dan belum terhubung secara optimal dengan lembaga lain dalam rantai nilai ekonomi. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya pemanfaatan potensi lokal serta terbatasnya pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan.

Hasil pemetaan juga menunjukkan adanya aktor-aktor kunci yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antar lembaga, seperti pemerintah desa dan kelompok usaha tertentu. Keberadaan aktor ini menjadi penting dalam mendorong komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antar pihak. Oleh karena itu, penguatan peran aktor kunci dan pengembangan mekanisme kolaborasi menjadi faktor penting dalam mendukung penguatan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan relasi kelembagaan di Kawasan Transmigrasi Lunang–Silaut, dapat disimpulkan bahwa secara umum kawasan ini telah memiliki struktur kelembagaan ekonomi yang relatif lengkap dan tersebar di setiap desa/nagari. Keberadaan lembaga ekonomi formal, seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan koperasi, menunjukkan adanya upaya pemerataan kelembagaan sebagai dasar penguatan ekonomi kawasan.

Hasil pemetaan spasial dan sosial menunjukkan bahwa meskipun lembaga ekonomi formal tersedia secara administratif di seluruh wilayah, tingkat aktivitas, peran, dan keterhubungan antar lembaga masih bervariasi. Lembaga ekonomi yang berada di wilayah dengan aksesibilitas lebih baik dan kedekatan dengan pusat aktivitas kawasan cenderung memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, di wilayah yang relatif jauh dari pusat kegiatan, peran kelembagaan ekonomi masih belum optimal.

Pemetaan relasi kelembagaan juga menunjukkan bahwa hubungan antar aktor, baik antara pemerintah desa, lembaga ekonomi, maupun pelaku usaha lokal, belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi yang kuat. Beberapa aktor kunci, seperti pemerintah desa dan kelompok usaha tertentu, memiliki peran strategis sebagai penghubung, namun mekanisme koordinasi dan kolaborasi antar lembaga masih bersifat parsial.

Dengan demikian, pemetaan sosial dan relasi kelembagaan berbasis spasial memberikan pemahaman yang penting mengenai dinamika kelembagaan ekonomi di

Kawasan Transmigrasi Lunang–Silaut. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi kawasan tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya dan infrastruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas relasi sosial, kapasitas kelembagaan, serta integrasi antar aktor di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Berbasis Potensi Lokal. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang–Silaut. Pesisir Selatan.
- Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2021). Pemetaan sosial dan kelembagaan dalam mendukung pembangunan wilayah berbasis potensi lokal. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(2), 115–128.
- Setiawan, B., & Nugroho, S. (2019). Pemanfaatan SIG dalam pemetaan sosial ekonomi wilayah. *Jurnal Geografi*, 11(2), 123–134.
- Suryanto, T. (2020). Peran kelembagaan lokal dalam pengembangan ekonomi wilayah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 18(1), 45–58.